

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Arief, m. d. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, PT alumni
- Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan  
Majalah Hukum tahun XXI Nomor 281, 2008
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi  
yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*,  
2010.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek- Aspek Perkembangan  
Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum  
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008,  
hlm.37
- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan  
Pengamatan Narapidana*, tanpa penerbit, Jakarta, 1983
- Evi Hartanti, SH, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar  
Kenegaraan Modern*, Jakarta, 2018

- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1987
- H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014
- Iskandar, *Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2018
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Keens Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013 hlm 45
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006

- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Depok, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Yogyakarta, 2011
- Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Nugraheni, H. dkk, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, cet. 1. Semarang: Politekkes Kemenkes, 2017
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pembaharuan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987
- Paulus Hadi Suprpto, *Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural, Komisi Yudisial*, Jakarta, 2009
- Puspitasari, S. d., & Sudikno, b. S. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Hlm 52-68
- RE. Baringbang, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung, 2013
- Siti Soetami, S.H. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Nullum Delictum Nulla*

*Poena Sinepraevia Lege Poenali*, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011

**B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang- Undang Dasar 1945

Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-perundangan

Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi

### C. Sumber Jurnal Ilmiah :

- Ali, m. (2018). *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*.  
jurnal Hukum ius Quia Iustum.
- Anam, A. D. (2016). *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif* . Journal article oleh Dosen Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiayah
- Ardiansya, I. *Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017
- Arsyad, A. *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 (No.2), 2010
- DR. M. Syamsa Ardisasmita, *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*, Jurnal article; Jakarta, 2006.
- La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum La Pro Justitia, Volume 26 No.1
- Manegeng, Rebeca V. *Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. 2, (No.8), 2017

Nicolas Hany, *DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG*, Journal article 2015

Rais, H. M. (2017). *NILAI KEADILAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*, joernal hukum pidana dan ketatanegaraan

Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Vol.8, (No.1), 2012

Riskanawati. (2016). Disparitas Tindak Pidana Korupsi . *Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)*, 39. Jurnal legal reseach Volume 1 Issue 1

Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997.

Tama S. Langkun, B. T. (2014). Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *DISPARITAS*, 39.

Wardojo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2, (No.1), 2018

#### **D. Sumber Lainnya :**

Ade Rizky Fachreza, Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia, terdapat dalam <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan->

[hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensiputusan-dalam-peradilan-indonesia/](#), diakses pada 21 Desember 2020

Aida Mardatillah, artikel yang berjudul “ Catatan ICW terhadap Perma  
Pemidanaan Perkara Tipikor”

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f2d4cfd29be7/catatan-icw-terhadap-perma-pemidanaan-perkara-tipikor/](#) diakses pda 23  
maret 2020

Ardhyanasari, A. (2017). *Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi*.  
Retrieved from [https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id](#), diakses tanggal 02 juni 2018

Franz L. Neumann, *The Rule of Law*, Learnington Spa, Heidelberg, 1986,  
hlm56 Ketua Mahkamah Agung RI, *Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995, hal. 26.

MaPPI FH UI “[Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor](#)”  
[http://mappifhui.org/2020/12/08/sosialisasi-publik-perma-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor/](#), di akses pada 28 maret 2021

## MODUL MATERI TINDAK PIDANA KORUPSI

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diakses pada 19 desember 2020

Pakar hukum Unsoed Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho. ANTARA/Sumarwoto, *Perma No 1 tahun 2020 masih kurang lengkap*, diakses pada 20 juli 2021 pukul 10.00 Wib, <https://www.antaranews.com/berita/1646414/pakar-perma-nomor-1-tahun-2020-masih-kurang-lengkap>

Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor, oleh Yeremia Sukoyo, <https://www.beritasatu.com/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparitas-hukuman-koruptor>, diakses pada 20 maret 2020

PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI, *BAHAYA DAN DAMPAK KORUPSI*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis#:~:text=Tindakan%20korupsi%20merupakan%20tindakan%20yang,kebahagiaan%20masyarakat%20di%20suatu%20negara.>, diakses pada 24 April 2021, pukul 11.00 Wib

Webinar sosialisasi publik PERMA 1/2020, di akses pada 4 Januari 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=hyw4pXFIZAs>

Yeremia Sukoyo, *Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor*. 2020 di akses pada 25 Juli, <https://www.beritasatu.com/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparitas-hukuman-koruptor>